

## STRATEGI PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH WIRING TAPPARENG KELURAHAN TEDDAOPU, KECAMATAN TEMPE, KABUPATEN WAJO

**Andi Asmulyani**

Teknik Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar  
ayumi\_el@gmail.com

### ABSTRAK

*Permukiman Wiring Tappareng merupakan salah satu kawasan permukiman yang terletak di Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Berdasarkan S.K Bupati Wajo Nomor 588 Tahun 2020 Permukiman Wiring Tappareng memiliki luas 4,23 Ha yang terdiri dari RT 001/RW 002 dan RT 002/RW 002 dengan tingkat kekumuhan sedang. Faktor-faktor yang berpengaruh di Permukiman Wiring Tappareng yaitu pada faktor sarana dan prasarana yang meliputi kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan dan strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan, digunakan analisis pembobotan (skoring) berdasarkan 7 indikator dari sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yaitu menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process). Sehingga hasil dari penelitian ini tingkat kekumuhan termasuk dalam kategori ringan dan strategi penataan pada permukiman wiring tappareng untuk rencana bangunan gedung yaitu peremajaan (revitalisasi) berupa perbaikan dan penambahan komponen bangunan, rencana jalan lingkungan yaitu pemugaran (rehabilitasi) berupa peningkatan kapasitas jalan, rencana drainase lingkungan yaitu peremajaan (revitalisasi) dengan pembuatan tanggul di sepanjang aliran Sungai Walanae, rencana penyediaan air minum yaitu peremajaan (revitalisasi) berupa pembuatan reservoir, rencana pengelolaan air limbah yaitu pemugaran (rehabilitasi) dengan pembuatan saluran pembuangan air limbah rumah tangga, rencana pengelolaan persampahan yaitu peremajaan (revitalisasi) berupa pembuatan TPS di setiap ruas jalan dan untuk rencana proteksi kebakaran yaitu peremajaan (revitalisasi) berupa penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.*

**Kata Kunci** : Permukiman Kumuh, Tingkat Kekumuhan, AHP, Strategi Penataan

### A. PENDAHULUAN

Dinamika Penduduk di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang begitu pesat dari tahun ke tahun, hingga menyebabkan peningkatan kebutuhan akan ruang hidup itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan hasil rilis data Direktorat Jenderal Dukcapil tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah 273.879.750 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dapat memberikan dampak terhadap penataan ruang hidup masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan akan berakibat pada semakin meningkatnya kepadatan penduduk terutama di kota-kota besar yang menyebabkan peningkatan pada kegiatan pembangunan, hal ini akan menjadikan terlampauinya kapasitas lahan untuk permukiman. Akibatnya lahan-lahan yang sempit sekalipun, yang seharusnya tidak layak diperuntukan untuk lahan permukiman telah ditempati pula oleh bangunan rumah mukim yang ukurannya

kecil, tata letaknya tidak teratur dan kualitas bangunannya sangat sederhana dan tidak layak huni.

Keberadaan permukiman kumuh dari tahun ke tahun didaerah perkotaan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Secara fisik daerah kumuh ditandai oleh bentuk rumah kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola settlement yang tidak teratur serta kualitas lingkungan yang rendah, juga minimnya fasilitas umum. Dari fenomena kependudukan, daerah kumuh juga ditandai dengan rendahnya kualitas kehidupan, tingginya angka kepadatan.

Pemenuhan kebutuhan akan ruang hidup menjadi hal yang sangat penting serta penanganan kualitas permukiman yang layak menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan tempat hidup yang bebas dari kekumuhan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5:32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ  
فِي الْأَرْضِ لُمُتْرِفُونَ ۝ ٣٢

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Kementerian Agama RI, 2019)

Tafsir Q.S. Al-Maidah/5:32, menurut Kementerian Agama RI (2019) menyatakan bahwa:

Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.

Ayat ini menjelaskan bahwa keselamatan merupakan hal yang bersifat urgent dengan memberikan ruang hidup yang layak bagi masyarakat untuk menciptakan peradaban manusia yang lebih baik. Permukiman berdasarkan ajaran Islam adalah Darussalam. Dar berarti rumah, perkampungan, wilayah, daerah, kawasan, atau Negara. Salam berarti keselamatan, kesejahteraan, dan as-salam berarti keselamatan, kesejahteraan dalam Islam. Jadi Darussalam adalah perkampungan atau permukiman yang menimbulkan kesejahteraan dan keselamatan.

Kecamatan Tempe merupakan kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk 66.143 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2022, serta memiliki tingkat kepadatan penduduk 1.728 jiwa/Km<sup>2</sup>. Selain itu, wilayah kecamatan ini memiliki 42 titik

lokasi kawasan permukiman kumuh dengan luas total 209.795 Ha berdasarkan S.K Bupati Wajo No. 588 Tahun 2020. Titik lokasi kawasan kumuh ini umumnya permukiman tersebut terletak di sekitar tepian air Sungai Walanae dan Danau Tempe.

Salah satu titik lokasi permukiman kumuh Wiring Tappareng yaitu terletak di Kelurahan Teddaopu yang berada di tepian Sungai Walanae. Berdasarkan S.K Bupati Wajo No. 588 Tahun 2020, kelurahan ini memiliki kawasan kumuh seluas 4.23 Ha dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu 170 jiwa/Ha. Wilayah ini memiliki tingkat kekumuhan yang cukup tinggi. sehingga dibutuhkan penataan kawasan permukiman agar dapat menciptakan lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengurangi berbagai permasalahan yang ada di kawasan tersebut yang mendorong munculnya kawasan yang tidak tertata yang disebabkan oleh terbatasnya lahan permukiman sehingga tepian Sungai Welannae menjadi lahan permukiman. Dimana kondisi ini permukiman menjadi kumuh, maka dibutuhkan strategi penataan permukiman kumuh yang baik di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nantinya dan merasa nyaman tinggal di permukimannya, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Strategi Penataan Permukiman Wiring Tappareng di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman Wiring Tappareng di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman Wiring Tappareng di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

1. Perumahan dan Permukiman
  - a. Pengertian Perumahan  
Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam SNI 03-6981-2004 perumahan didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
  - b. Pengertian Permukiman  
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

c. Elemen Perumahan dan Permukiman

Menurut Fajari (2014) permukiman terdiri dari:

- Alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh- tumbuhan, hewan, dan iklim.
- Manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang, udara, temperatur, dsb), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral.
- Masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan administrasi
- Fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat (sekolah, rumah sakit, dsb), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan, industri, kesehatan, hukum dan administrasi
- Jaringan (network) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen kepemilikan, drainase dan air kotor, dan tata letak fisik.

2. Permukiman Kumuh

a. Pengertian Permukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Adapun definisi permukiman kumuh dari para ahli berdasarkan sudut pandang dalam menilai dan mendefinisikan permukiman kumuh yaitu:

- 1) Judohusodo (2019) mendefinisikan permukiman kumuh dari fenomena kependudukan yakni permukiman kumuh merupakan permukiman yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup seperti tingginya angka kepadatan penduduk yaitu berkisar 350-1.250 jiwa per hektare dengan ukuran luas kampung mulai 15-20 hektar are. Dari seluruh bangunan rumah yang ada di permukiman kumuh, 60-70% ditempati oleh pemilik dan 30-40% disewakan yang sistem sewanya dalam satu kamar dihuni oleh beberapa orang atau satu keluarga.
- 2) Muta'ali dan Nugroho (2019), berdasarkan hasil observasi lapangannya menyebutkan bahwa ciri-ciri Kawasan permukiman kumuh yang menonjol dan perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
  - Rumah beratapkan jerami,
  - Rumah tanpa jendela/ventilasi udara, dan sinar matahari tidak dapat masuk,
  - Tidak terdapat pembagian ruang/kamar sesuai dengan peruntukannya,
  - Dinding dan lantai telah lapuk

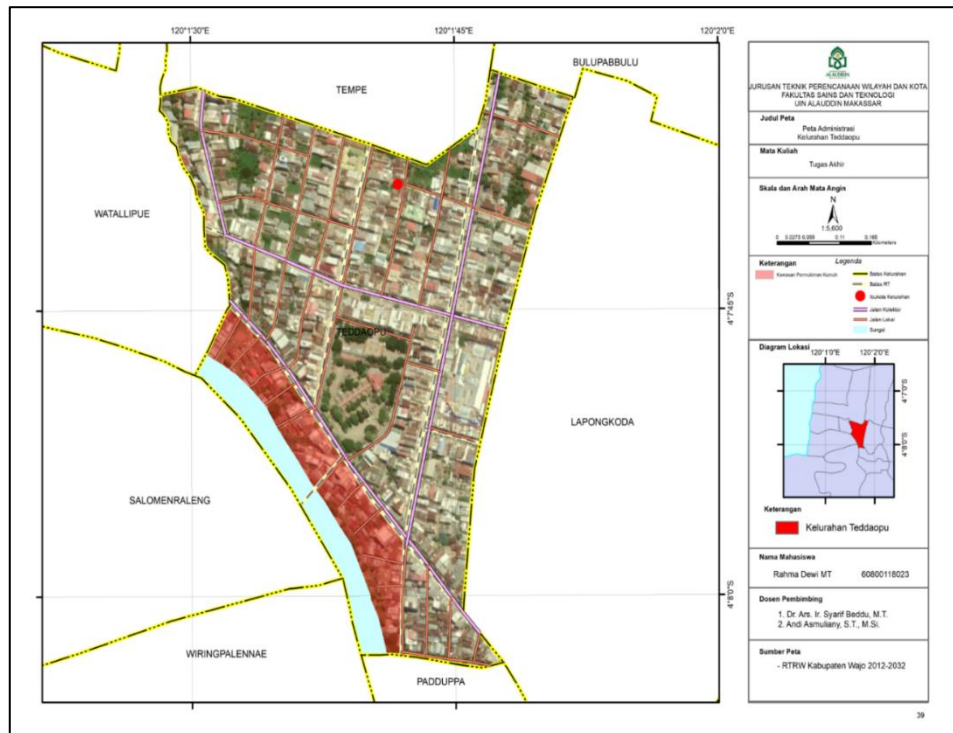
- Banyak dihuni oleh anggota rumah tangga tidak produktif,
  - Kepala rumah tangga bekerja pada jenis pekerjaan berpenghasilan rendah,
  - Tidak memiliki jamban, dan
  - Berada pada lingkungan permukiman dengan sanitasi jelek.
- 3) Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan dalam Budy dan Fredy (2016) adalah:
- Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
  - Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
  - Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
  - Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan- satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas.
  - Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
- 4) Yeh & Turner (2019) ciri-ciri nonfisik permukiman kumuh ditandai dengan jenis pekerjaan penghuninya yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan tingkat penghasilan yang rendah, dan jumlah anggota keluarga yang relatif banyak. Permukiman kumuh juga disinyalir terkait dengan lamanya tinggal di permukaan serta Pendidikan penghuninya yang rendah.

## **E. METODOLOGI PENELITIAN**

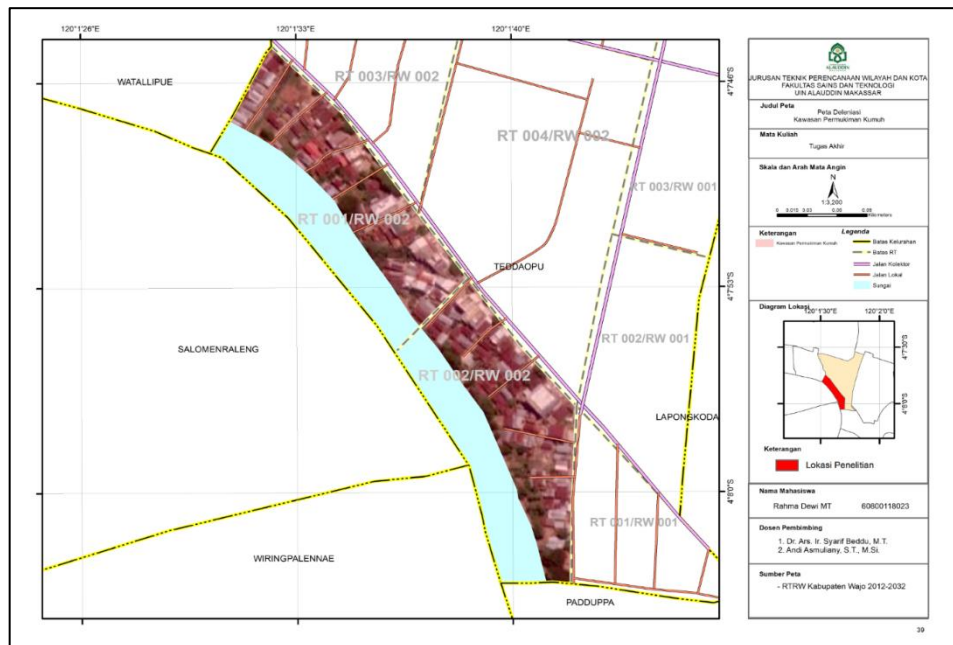
### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Kelurahan Teddaopu merupakan salah satu kelurahan dari 44 wilayah yang berstatus kumuh. di Kabupaten Wajo. Kelurahan ini memiliki 2 (dua) Rukun Warga (RW) yang merupakan Kawasan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng yaitu RT 001/RW 002 dan RT 002/RW 002 dengan luas 4,23 Ha, berdasarkan keputusan Bupati No: 588 Tahun 2020 lokasi permukiman Wiring Tappareng berada di bantaran Sungai Walanae sehingga Kawasan Wiring Tappareng rawan akan bencana banjir dengan keadaan permukiman yang masuk dalam kategori kumuh sedang.

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**



**Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Teddaopu**



**Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian**

**F. POPULASI DAN SAMPEL**

**1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini

yaitu seluruh masyarakat yang bermukim di Wiring Tappareng RW 02 Kelurahan Teddaopu yang berjumlah 383 jiwa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek dalam suatu penelitian. Menurut (Hendryadi, 2014) sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Pada analisis tingkat kekumuhan digunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel, adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.D^2+1} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N: Jumlah populasi (383 jiwa)

D2 : Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

Dari rumus tersebut perhitungan sampel yang diambil dengan tingkat kepercayaan 90% dengan tingkat kesalahan 10% adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{383}{383(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{383}{3,83 + 1}$$

$$n = 79$$

Jadi, sampel untuk penelitian ini yaitu 79 jiwa.

Menurut Maklufah (2013) jumlah responden >100, maka pengambilan sampel 10%-15% atau 20%-25%. Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 21% dari jumlah populasi untuk memperoleh jumlah sampel sebanyak 79 jiwa, sehingga proporsi sampel tiap kelas adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Kelas dan Jumlah Sampel

No	Lingkup Administrasi (RT)	Jumlah (jiwa)	Proporsi (21%)	Jumlah sampel (jiwa)
1.	RT 001	223	183 x 0,21	46
2.	RT 002	160	176 x 0,21	33
Total		383		79

Berdasarkan Tabel diatas, dengan menggunakan persentase proporsi 21% maka diperoleh jumlah sampel untuk penduduk di RT 001 sebanyak 46 jiwa, sedangkan untuk jumlah sampel penduduk RT 002 yaitu sebanyak 79 jiwa.

## G. VARIABEL DAN INDIKATOR

Menurut Arikunto (2010), variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Bertolak dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

**Tabel 2.** Kebutuhan Data Identifikasi Karakteristik Lokasi dan Penghuni Permukiman Kumuh

Variabel	Indikator
Lokasi	1. Frekuensi Bencana Banjir 2. Frekuensi Bencana Kebakaran
Kependudukan	1. Kepadatan penduduk 2. Pertumbuhan Penduduk 3. Mata pencaharian
Ekonomi	1. Tingkat Pendapatan 2. Jenis Pekerjaan
Sosial	1. Tingkat Pendidikan 2. Lama Tinggal

Sumber : Hasil Analisa 2022

**Tabel 3.** Kebutuhan Data Identifikasi Karakteristik Sarana dan Prasarana Permukiman

Aspek	Kriteria	Data Numerik
Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidak-teraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur
	b. Tingkat kepadatan bangunan	Luas kawasan sesuai dengan persyaratan
	c. Ketidak-sesuaian dengan persyaratan teknis	Jumlah bangunan tidak sesuai persyaratan teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan	Panjang jalan ideal-Panjang jalan eksisting
	b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang Jalan Rusak
Kondisi Penyediaan air minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup
Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidak-mampuan mengalirkan limpasan air	Luas kawasan yang terkena genangan
	b. Ketidak-tersediaan drainase	Panjang drainase ideal-Panjang drainase eksisting
	c. Ketidak-terhubungan dengan sistem drainase perkotaan	Panjang drainase penghubung
	d. Tidak terpeliharanya drainase	Panjang sistem drainase tidak terpelihara



Aspek	Kriteria	Data Numerik
	e. Kualitas konstruksi drainase	Panjang drainase yang buruk
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah KK dengan sapras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
	b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis
	c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana pengolahan sampah tidak terpelihara
Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidak-tersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran
	b. Ketidak-tersediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup

Sumber : Hasil Analisa 2022

## H. METODE ANALISIS

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana tingkat kekumuhan di permukiman Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu yaitu menggunakan analisis pembobotan (skoring). Pembobotan adalah penilaian terhadap setiap parameter yang dijadikan sebagai analisis pada kriteria permukiman kumuh untuk mengetahui tingkat kekumuhannya. Pembobotan dengan memberikan nilai pada tingkat kekumuhan dengan skala 71-95 untuk kumuh berat, 45-70 untuk kumuh sedang, 19-44 untuk kumuh ringan dan <19 untuk tidak kumuh. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan mengacu pada kriteria berikut parameter untuk tingkat kekumuhan yang digunakan:

**Tabel 4.** Tingkat Kekumuhan

Jumlah Nilai	Keterangan
71-95	Kumuh Berat
45-70	Kumuh Sedang
19-44	Kumuh Ringan
<19	Tidak Kumuh

Sumber: Permen PUPR No.14 Tahun 2018

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan  
Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

a. Analisis Tingkat Kekumuhan

**Tabel 5. Formulasi Penilaian**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	KETERANGAN	NILAI
<b>IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>				
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	• 76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan yang tidak menghadap ke jalan memiliki aksesibilitas yang sulit karena bangunannya terhalang oleh bangunan lain .</li> <li>• Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Sungai.</li> </ul>	5
		• 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan		3
		• 25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan		1
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk kota metropolitan dan kota besar &gt;250 unit/Ha</li> <li>• Untuk kota sedang dan kota kecil &gt;200 unit/Ha</li> </ul>	5
		• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan		3
		• 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan		1
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian dampak lingkungan</li> <li>• Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum</li> <li>• Keselamatan bangunan</li> <li>• Kesehatan bangunan</li> <li>• Kenyamanan bangunan</li> <li>• Kemudahan bangunan</li> </ul>	5
		• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		3
		• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis		1
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	Keterhubungan antar persil dalam kawasan permukiman, keterhubungan jalan lingkungan ke jalan sekunder lainnya, agar akses jalan dapat selalu dilalui kendaraan	5
		• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan		3
		• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan		1
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk dimana kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.	5
		• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk		3
		• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk		1
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	• 76% - 100% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak	5

**Andi Asmulyan, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan  
Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	KETERANGAN	NILAI	
<b>IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> </ul>	berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman</li> </ul>		1	
	b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman dapat mengakses air minum dan memenuhi kebutuhan air minum keluarga pertahunnya	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>		3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya</li> </ul>		1	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidak-mampuan Mengalirkan Air Limpasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area tidak mampu mengalirkan air limpasan</li> </ul>	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area tidak tersedia area tidak mampu mengalirkan air limpasan</li> </ul>		3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area tidak mampu mengalirkan air limpasan</li> </ul>		1	
	b. Ketidak-tersediaan Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% area ketidak-tersediaan drainase</li> </ul>	Jumlah bangunan yang tidak memiliki drainase	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% area ketidak-tersediaan drainase</li> </ul>		3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% area ketidak-tersediaan drainase</li> </ul>		1	
	c. Ketidak-terhubungan dengan Sistem Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>	Jumlah bangunan yang tidak memiliki drainase yang terhubung dengan sistem pengelolaan perkotaan (drainase sekunder)	5	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>		3	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis</li> </ul>		1	
		d. Tidak Terpeliharanya a Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76%-100% area tidak terpeliharanya sistem drainase</li> </ul>	Panjang drainase yang tidak terpelihara dan telah mengalami kerusakan berupa rusaknya drainase atau terjadi penumpukan sampah atau material lainnya yang menyebabkan pendangkalan pada drainase.	5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51%-75% area tidak terpeliharanya sistem drainase</li> </ul>		3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25%-50% area tidak terpeliharanya sistem drainase</li> </ul>	1		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 76%-100% area dengan kualitas konstruksi drainase</li> </ul>	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa	5		

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	KETERANGAN	NILAI
<b>IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>				
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 51%-75% area dengan kualitas konstruksi drainase</li> <li>• 25%-50% area dengan kualitas konstruksi drainase</li> </ul>	material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	3 1
5. Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	• 76% - 100% populasi dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	5
		• 51% - 75% populasi dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis		3
		• 25% - 50% populasi dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis		1
	b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	• 76% - 100% Populasi dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik</li> <li>• Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat</li> </ul>	5
		• 51% - 75% Populasi dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis		3
		• 25% - 50% Populasi dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis		1
6. Kondisi pengelolaan persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	• 76% - 100% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga</li> <li>• Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan</li> <li>• Sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan;</li> <li>• Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.</li> </ul>	5
		• 51% - 75% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis		3
		• 25% - 50% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis		1
	b. Sistem pengelolaan persampahan tidak	• 76% - 100% populasi dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	5

**Andi Asmulyan, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	KETERANGAN	NILAI
<b>IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN</b>				
	memenuhi persyaratan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>51% - 75% populasi dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis</li> <li>25% - 50% populasi dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pewadahan dan pemilahan domestic</li> <li>Pengumpulan lingkungan</li> <li>Pengangkutan lingkungan</li> <li>Pengelolaan lingkungan</li> </ul>	3
				1
	c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>76%-100% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak terpelihara</li> <li>51%-75% populasi dengan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak terpelihara</li> </ul>	Ketersediaan dan terpeliharanya tempat pembuangan sampah yang memudahkan masyarakat untuk membuang sampah.	5
				3
				1
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>76%-100% bangunan tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran</li> <li>51%-75% bangunan tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran</li> <li>25% - 50% bangunan memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar</li> </ul>	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasokan air</li> <li>Jalan lingkungan</li> <li>Sarana komunikasi</li> <li>Data sistem proteksi kebakaran lingkungan</li> </ul>	5
				3
				1
	b. Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>76% - 100% bangunan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> <li>51% - 75% bangunan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> <li>25% - 50% bangunan tidak memiliki sarana proteksi kebakaran</li> </ul>	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> <li>Kendaraan pemadam kebakaran</li> <li>Mobil tangga sesuai kebutuhan.</li> </ul>	5
				3
				1

Sumber : Hasil Analisa 2022

b. Teknik Penilaian Kriteria Kekumuhan

**Tabel 6.** Teknik Penilaian Kriteria Kekumuhan

Indikator	Sub Indikator	Rumus yang digunakan
Kondisi bangunan gedung	Ketidakteraturan bangunan yaitu jumlah bangunan yang tidak memiliki keteraturan.	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak teratur (Unit)}}{\text{Jumlah Bangunan keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$
	Tingkat kepadatan bangunan yaitu luas kawasan yang memiliki kepadatan tidak sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Luas Wilayah (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Kumuh (Unit)}} \times 100\%$
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis yaitu jumlah bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis (Unit)}}{\text{Jumlah Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan dapat dilihat dari dua indikator yakni, perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman skala wilayah dan perlunya keterhubungan antar persil dalam perumahan dalam skala kawasan	$\frac{\text{Panjang jalan ideal (m)} - \text{Panjang jalan eksisting}}{\text{Panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$
	Kualitas permukaan jalan lingkungan yaitu panjang jalan rusak	$\frac{\text{Total Panjang Jalan Yang Rusak}}{\text{Total Panjang Jalan Keseluruhan}} \times 100\%$
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum yaitu jumlah KK yang tidak terakses air minum aman	$\frac{\text{Jumlah KK tidak terakses air minum aman}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum yaitu jumlah KK yang tidak terakses air minum cukup	$\frac{\text{Jumlah KK tidak terakses air minum cukup}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidak-mampuan mengalirkan air limpasan yaitu menggunakan data luas kawasan yang tergenang yaitu	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$
	Ketidak-tersediaan Drainase dengan menggunakan data Panjang drainase ideal dan panjang drainase eksisting	$\frac{\text{Panjang ideal (m)} - \text{Panjang eksisting (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
	Ketidak-terhubungan dengan Sistem Perkotaan yaitu dengan menggunakan data panjang drainase akses ke sistem kota,	$\frac{\text{Panjang drainase penghubung (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
	Tidak-terpeliharanya Drainase yaitu dengan menggunakan data Panjang drainase yang tidak terpelihara,	$\frac{\text{Panjang sistem drainase tidak terpelihara (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis yaitu jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis.	$\frac{\text{Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$
	Sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis yaitu jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai persyaratan teknis.	$\frac{\text{Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$
	Sarana dan Prasarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis, data yang digunakan yaitu data jumlah KK dengan sarana dan prasarana pengolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis,	$\frac{\text{Jumlah KK dengan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$
	Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis yaitu jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	$\frac{\text{Jumlah KK dengan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, data yang digunakan adalah jumlah KK dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak terpelihara	$\frac{\text{Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times 100\%$
Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran yaitu jumlah bangunan yang tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran.	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
	Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran yaitu jumlah bangunan yang tidak terlayani sarana proteksi kebakaran.	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Tidak Terlayani Sarana Proteksi Kebakaran (Unit)}}{\text{Jumlah Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$

Sumber : Hasil Analisa 2022

- Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng di Kelurahan Teddaopu dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan metode analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Peralatan utama AHP adalah sebuah hirarki fungsional dengan masukan utamanya adalah persepsi manusia. Keberadaan hirarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hirarki. AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

## I. HASIL DAN PEMBAHASAN

- Analisis Identifikasi Tingkat Kekumuhan di Permukiman Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu.

**Tabel 7.** Analisis Pembobotan Kawasan Permukiman Kumuh

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidak-teraturan Bangunan	32,45% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	26,95% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1
	c. Ketidak-sesuai dengan persyaratan teknis	36,84% bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	13,04% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	13,06% area memiliki kualitas jalan yang buruk	0
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	31,19% KK tidak terakses air minum aman	1
	b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	0% KK tidak terakses air minum	0
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidak-mampuan Mengalirkan Air Limpasan	76,36% area tidak mampu mengalirkan air limpasan	5
	b. Ketidak-tersediaan Drainase	72,04% area tidak tersedia drainase	3

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

ASPEK	KRITERIA	PARAMETER	NILAI
	c. Ketidak-terhubungan dengan Sistem Perkotaan	4,71% area tidak terhubung dengan sistem perkotaan	0
	d. Tidak terpeliharanya drainase	72,04% area memiliki drainase tidak terpelihara	3
	e. Kualitas konstruksi drainase	72,04% area memiliki kualitas konstruksi drainase buruk	3
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	0% KK dengan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	0
	b. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	0% KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	0
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Sarana dan Prasarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	78,89% KK memiliki sarana dan prasarana pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	78,89% KK memiliki sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	5
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidak-tersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	22,80% bangunan tidak terlayani proteksi kebakaran	0
	b. Ketidak-tersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	100% bangunan tidak terlayani proteksi kebakaran	1
<b>TOTAL</b>			<b>29</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Dari tabel diatas, adapun hasil analisis pembobotan tingkat kekumuhan di Permukiman Wiring Tappareng dengan hasil jumlah nilai tingkat kekumuhan yaitu 29. Berdasarkan tabel 24 mengenai nilai tingkat kekumuhan, maka permukiman Wiring Tappareng termasuk kategori kumuh ringan.

2. Hasil Pengolahan Data Kuesioner AHP Pengendalian Permukiman Kumuh  
**Tabel 8.** Penentuan Prioritas Perbandingan Faktor Alternatif Penilaian  
 Pemilihan Aspek Setiap Kriteria

No	Indikator	Matriks Prioritas Berdasarkan Perbandingan Alternatif	Keterangan						
1	Penentuan Prioritas Bobot Perbandingan Alternatif Menurut Aspek Kondisi Bangunan Gedung	<p>Combined instance - Synthesis with respect to: Bangunan Gedung                      (Goal: STRATEGI PENATAAN P. Bangunan Gedung (L: 048))                      Overall Inconsistency = .00</p> <table border="1"> <tr> <td>Rehabilitasi (Pemugaran)</td> <td>.447</td> </tr> <tr> <td>Revitalisasi (Peremajaan)</td> <td>.457</td> </tr> <tr> <td>Relokasi (Permukiman Kembali)</td> <td>.096</td> </tr> </table>	Rehabilitasi (Pemugaran)	.447	Revitalisasi (Peremajaan)	.457	Relokasi (Permukiman Kembali)	.096	Alternatif strategi penataan untuk aspek kriteria kondisi bangunan gedung, alternatif yang sangat sesuai untuk dilakukan adalah revitalisasi (peremajaan) dengan nilai sebesar 0,457 atau 45,7%. Sedangkan untuk alternatif konsep rehabilitasi memiliki nilai sebesar 0,447 atau 44,7% dan konsep relokasi memiliki nilai hanya sebesar 0,096 atau 9,6%.
Rehabilitasi (Pemugaran)	.447								
Revitalisasi (Peremajaan)	.457								
Relokasi (Permukiman Kembali)	.096								
2	Penentuan Prioritas Bobot Perbandingan		Alternatif strategi penataan untuk aspek kriteria kondisi jalan lingkungan, alternatif yang sangat sesuai untuk						



**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

	Alternatif Menurut Aspek Kondisi Jalan Lingkungan	<p>Combined instance – Synthesis with respect to: Jalan Lingkungan (Goal: STRATEGI PENATAAN P &gt; Jalan Lingkungan (L: 061) Overall Inconsistency = .00</p> <table border="1"> <tr><td>Rehabilitasi (Pemugaran)</td><td>0.650</td></tr> <tr><td>Revitalisasi (Peremajaan)</td><td>0.260</td></tr> <tr><td>Relokasi (Permukiman Kembali)</td><td>0.090</td></tr> </table>	Rehabilitasi (Pemugaran)	0.650	Revitalisasi (Peremajaan)	0.260	Relokasi (Permukiman Kembali)	0.090	dilakukan adalah rehabilitasi (pemugaran) dengan nilai sebesar 0,650 atau 65% . Sedangkan untuk alternatif konsep revitalisasi memiliki nilai sebesar 0,260 atau 26% dan konsep relokasi memiliki nilai hanya sebesar 0,090 atau 9%.
Rehabilitasi (Pemugaran)	0.650								
Revitalisasi (Peremajaan)	0.260								
Relokasi (Permukiman Kembali)	0.090								
3	Penentuan Prioritas Bobot Perbandingan Alternatif Menurut Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum	<p>Combined instance – Synthesis with respect to: Penyediaan Air Minum (Goal: STRATEGI PENATAAN P &gt; Penyediaan Air Minum (L: ) Overall Inconsistency = .00</p> <table border="1"> <tr><td>Rehabilitasi (Pemugaran)</td><td>0.171</td></tr> <tr><td>Revitalisasi (Peremajaan)</td><td>0.685</td></tr> <tr><td>Relokasi (Permukiman Kembali)</td><td>0.144</td></tr> </table>	Rehabilitasi (Pemugaran)	0.171	Revitalisasi (Peremajaan)	0.685	Relokasi (Permukiman Kembali)	0.144	Alternatif strategi penataan untuk aspek kriteria kondisi penyediaan air minum, alternatif yang sangat sesuai untuk dilakukan adalah revitalisasi (peremajaan) dengan nilai sebesar 0,685 atau 68,5% . Sedangkan untuk alternatif konsep rehabilitasi memiliki nilai sebesar 0,171 atau 17,1% dan konsep relokasi memiliki nilai sebesar 0,144 atau 14,4% .
Rehabilitasi (Pemugaran)	0.171								
Revitalisasi (Peremajaan)	0.685								
Relokasi (Permukiman Kembali)	0.144								
4	Penentuan Prioritas Bobot Perbandingan Alternatif Menurut Aspek Kondisi Drainase Lingkungan	<p>Combined instance – Synthesis with respect to: Drainase Lingkungan (Goal: STRATEGI PENATAAN P &gt; Drainase Lingkungan (L: ) Overall Inconsistency = .00</p> <table border="1"> <tr><td>Rehabilitasi (Pemugaran)</td><td>0.101</td></tr> <tr><td>Revitalisasi (Peremajaan)</td><td>0.592</td></tr> <tr><td>Relokasi (Permukiman Kembali)</td><td>0.307</td></tr> </table>	Rehabilitasi (Pemugaran)	0.101	Revitalisasi (Peremajaan)	0.592	Relokasi (Permukiman Kembali)	0.307	Alternatif strategi penataan untuk aspek kriteria kondisi drainase lingkungan, alternatif yang sangat sesuai untuk dilakukan adalah revitalisasi (peremajaan) dengan nilai sebesar 0,592 atau 59,2% . Sedangkan untuk alternatif konsep relokasi memiliki nilai sebesar 0,307 atau 30,7% dan konsep rehabilitasi memiliki nilai hanya sebesar 0,101 atau 10,1% .
Rehabilitasi (Pemugaran)	0.101								
Revitalisasi (Peremajaan)	0.592								
Relokasi (Permukiman Kembali)	0.307								
5	Penentuan Prioritas Bobot Perbandingan Alternatif Menurut Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah	<p>Combined instance – Synthesis with respect to: Pengelolaan Air Limbah (Goal: STRATEGI PENATAAN P &gt; Pengelolaan Air Limbah (L: ) Overall Inconsistency = .00</p> <table border="1"> <tr><td>Rehabilitasi (Pemugaran)</td><td>0.722</td></tr> <tr><td>Revitalisasi (Peremajaan)</td><td>0.208</td></tr> <tr><td>Relokasi (Permukiman Kembali)</td><td>0.070</td></tr> </table>	Rehabilitasi (Pemugaran)	0.722	Revitalisasi (Peremajaan)	0.208	Relokasi (Permukiman Kembali)	0.070	Alternatif strategi penataan untuk aspek kriteria kondisi pengolahan air limbah, alternatif yang sangat sesuai untuk dilakukan adalah rehabilitasi (pemugaran) dengan nilai sebesar 0,722 atau 72,2% . Sedangkan untuk alternatif konsep revitalisasi memiliki nilai sebesar 0,208 atau 20,8% dan konsep relokasi memiliki nilai hanya sebesar 0,070 atau 7% .
Rehabilitasi (Pemugaran)	0.722								
Revitalisasi (Peremajaan)	0.208								
Relokasi (Permukiman Kembali)	0.070								
6	Penentuan Prioritas Bobot Perbandingan Alternatif Menurut Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan	<p>Combined instance – Synthesis with respect to: Pengelolaan Persampahan (Goal: STRATEGI PENATAAN P &gt; Pengelolaan Persampahan (L: ) Overall Inconsistency = .00</p> <table border="1"> <tr><td>Rehabilitasi (Pemugaran)</td><td>0.124</td></tr> <tr><td>Revitalisasi (Peremajaan)</td><td>0.602</td></tr> <tr><td>Relokasi (Permukiman Kembali)</td><td>0.274</td></tr> </table>	Rehabilitasi (Pemugaran)	0.124	Revitalisasi (Peremajaan)	0.602	Relokasi (Permukiman Kembali)	0.274	Alternatif strategi penataan untuk aspek kriteria kondisi pengelolaan persampahan, alternatif yang sangat sesuai untuk dilakukan adalah revitalisasi (peremajaan) dengan nilai sebesar 0,602 atau 60,2% . Sedangkan untuk alternatif konsep relokasi memiliki nilai sebesar 0,274 atau 27,4% dan konsep rehabilitasi memiliki nilai hanya sebesar 0,124 atau 12,4% .
Rehabilitasi (Pemugaran)	0.124								
Revitalisasi (Peremajaan)	0.602								
Relokasi (Permukiman Kembali)	0.274								
7	Penentuan Prioritas Bobot Perbandingan Alternatif Menurut Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran	<p>Combined instance -- Synthesis with respect to: Proteksi Kebakaran (Goal: STRATEGI PENATAAN P &gt; Proteksi Kebakaran (L: 1) Overall Inconsistency = .00</p> <table border="1"> <tr><td>Rehabilitasi (Pemugaran)</td><td>0.088</td></tr> <tr><td>Revitalisasi (Peremajaan)</td><td>0.639</td></tr> <tr><td>Relokasi (Permukiman Kembali)</td><td>0.273</td></tr> </table>	Rehabilitasi (Pemugaran)	0.088	Revitalisasi (Peremajaan)	0.639	Relokasi (Permukiman Kembali)	0.273	Alternatif strategi penataan untuk aspek kriteria kondisi proteksi kebakaran, alternatif yang sangat sesuai untuk dilakukan adalah revitalisasi (peremajaan) dengan nilai sebesar 0,639 atau 63,9% . Sedangkan untuk alternatif konsep relokasi memiliki nilai sebesar 0,273 atau 27,3% dan konsep
Rehabilitasi (Pemugaran)	0.088								
Revitalisasi (Peremajaan)	0.639								
Relokasi (Permukiman Kembali)	0.273								

**Andi Asmulyani, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

			rehabilitasi memiliki nilai hanya sebesar 0,088 atau 8,8%.
8	Penentuan Prioritas Bobot Perbandingan Alternatif Menurut Ketujuh Aspek Kondisi (Combine)		Alternatif strategi penataan untuk ketujuh aspek kriteria, alternatif yang sangat sesuai untuk dilakukan adalah revitalisasi (peremajaan) dengan nilai sebesar 0,573 atau 57,3%. Sedangkan untuk alternatif konsep relokasi (permukiman Kembali) memiliki nilai sebesar 0,243 atau 24,3% dan konsep rehabilitasi memiliki nilai hanya sebesar 0,184 atau 18,4%.

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

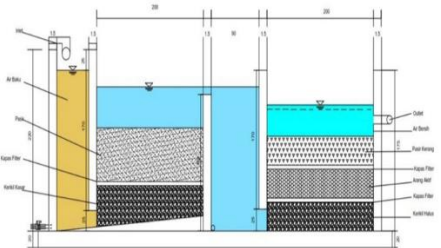

**3. Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

Berdasarkan hasil analisis prioritas dalam strategi penataan permukiman kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu melalui AHP yang telah dilakukan. Sehingga diperoleh hasil prioritas strategi penataan yang dapat dilakukan pada lokasi tersebut yaitu dapat dilihat pada hasil prioritas perbandingan masing-masing kriteria. Adapun strategi penataannya sebagai berikut:

**Tabel 9.** Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

No	Indikator	Strategi	Konsep
1	Rencana Bangunan Gedung	Peremajaan (revitalisasi) berupa perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Misalnya mengganti konstruksi pilar bangunan dari kayu menjadi beton hal ini dimaksudkan agar pilar bangunan lebih awet karena sebagaimana diketahui bahwa lokasi tersebut rawan banjir. Bangunan yang memerlukan perbaikan pilar bangunan ini yaitu bangunan yang tidak teratur (berada di sempadan sungai dan rawan terkena banjir) Adapun jumlah bangunan yang perlu perbaikan terhadap komponen bangunan yaitu 55 unit.	<p>Rumah Semi Permanen dengan pilar beton</p>
2	Rencana Jalan Lingkungan	Pemugaran (rehabilitasi) berupa peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar jalan dan perubahan material jalan sebagaimana kondisi jalan tersebut masih berupa tanah. Sebagaimana tercantum pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan pada halaman 12 untuk Jalan Lingkungan II standarnya yaitu 1.2 meter dengan konstruksi	<p>Potongan Jalan Lingkungan II</p>

**Andi Asmulyany, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

		perkerasan sebanyak 1 ruas jalan di RT 001 dan 2 ruas jalan di RT 002.	
3	Rencana Drainase Lingkungan	Peremajaan (revitalisasi) berupa pembangunan tanggul di sepanjang sungai Walanae	
4	Rencana Penyediaan Air Minum	Peremajaan (revitalisasi) berupa pembuatan reservoir (bak penampungan air) yang airnya bersumber dari air sungai dengan kondisi air yang kurang baik dikonsumsi tanpa melalui proses filterisasi terlebih dahulu. Sistem pengolahan reservoir berupa pengolahan air saringan pasir cepat atau Rapid Sand Filter yang merupakan saringan air yang dapat menghasilkan debit air hasil penyaringan yang lebih banyak. Daya tampung airnya disesuaikan dengan kebutuhan penduduk yang belum mendapat akses air minum aman yaitu sebanyak 195 jiwa. Berdasarkan Permen PU No.14 Tahun 2018 kebutuhan air setiap orang yaitu 60 liter/hari. Sehingga, kebutuhan air untuk 195 jiwa penduduk setiap harinya yaitu 11.700 liter atau 11,7 kubik.	 <p>Rencana bangunan pengolahan pasir cepat</p>
5	Rencana Pengelolaan Air Limbah	Pemugaran (rehabilitasi) berupa Pembuatan saluran pembuangan limbah rumah tangga berupa perpipaan dan pengolahan air limbah berupa tangki septik dengan filter tanaman. Tangki septik bersekat dengan filter dan tanaman adalah kombinasi antara tangki septik dengan bak yang diberi tanaman dimana tanaman ini akan menyerap air limbah melalui akar tanaman. Media penanam terdiri dari tanah dan kerikil dengan kemiringan antara 0-0,5%, air limbah berasal dari tangki septik yang berada di bagian ujung bak dialirkan pada media filter. Kebutuhan lahan untuk 50 KK adalah seluas 120 m <sup>2</sup> .	 <p>Tangki Septik Berfilter dan Tanaman</p>
6	Rencana Pengelolaan Persampahan	Peremajaan (revitalisasi) berupa : Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) berupa bak sampah kecil di setiap ruas jalan di Permukiman Wiring Tapparaeng Berdasarkan SNI 03-1733-2004 untuk lingkungan hunian dengan jarak bebas TPA minimal 30 meter maka,	

**Andi Asmuliany, Strategi Penataan Permukiman Kumuh Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo**

		penyediaan sarana pengangkutan sarana berupa motor gerobak sampah yang diangkut 3x seminggu.	
7	Rencana Proteksi Kebakaran	Peremajaan (revitalisasi) berupa penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran seperti hidran kebakaran. Pemasangan hidran kebakaran mengacu pada SNI 03-1735-2000 yaitu jarak pemasangan hidran harus sekitar 35-38 meter antara satu dengan yang lain. Perhitungan ini didasarkan pada jangkauan mencapai 1000 m <sup>2</sup> . Lalu jangkauan semburan nozzle-nya mencapai 5 meter. Sedangkan untuk bangunan yang berada disepanjang jalan masih dapat dijangkau dengan mobil pemadam kebakaran. Yang jangkauan selangnya mencapai 30 meter.	

Sumber ; Hasil Analisa 2022

## **J. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Strategi Penataan Permukiman Wiring Tappareng Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, maka dapat disimpulkan yaitu tingkat kekumuhan di permukiman Wiring Tappareng yaitu kategori ringan dengan jumlah nilai bobot 29.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan yaitu:

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Wajo, dalam penyusunan kebijakan pengurangan dan pencegahan permukiman kumuh di Kabupaten Wajo.
- b. Diharapkan pemerintah setempat dan kelompok masyarakat secara swadaya (mandiri) dapat berpartisipasi atau terlibat langsung dalam pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana permukiman kumuh.
- c. Penelitian ini bersifat umum, sehingga bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian yang lebih detail terkait penanganan permukiman kumuh dengan menambah variabel lain berupa kondisi ekonomi, dan sosial budaya guna melengkapi kajian yang telah dilakukan.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian*. (Rev. ed). Jakarta: Rineka Cipta.

BPS Kabupaten Wajo. (2022) *Kabupaten Wajo dalam Angka 2022*. (BPS Kabupaten Wajo(Ed)). Kabupaten Wajo.

BPS Kabupaten Wajo. (2022) *Kecamatan Tempe dalam Angka 2022*. (BPS Kabupaten Wajo(Ed)). Kabupaten Wajo.

Budy, A., & Fredy. (2016). Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh Kelurahan Tamamaung Kota Makassar. *LOSARI: Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman*, 85–89.

Damayanti, A. P., Hardiana, A., & Rahayu, P. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Permukiman di Wilayah Pesisir Kabupaten Purworejo. *REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 14(2), 154–172.

Fajari, R. S. (2014). Pengaruh Aktivitas Penunjang Wisata terhadap Perubahan Tata Ruang Desa (Studi Kasus: Desa Wisata Bejiharjo, Yogyakarta). In *eprints.undip.ac.id* (Issue 2004).

Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi. Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta mengelola Kekuatan dan Ancaman. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Hendryadi. (2014). Populasi Dan Sampel. *Teori Online Personal Paper*, 8(33), 44.

Kemenag, Quran (2019). Mushaf Standar Indonesia Rasm Usmani. <https://quran.kemenag.go.id>

Maklufah. (2013). Pengaruh Konformitas Teman Sebaya Terhadap Kepuasan Memilih Jurusan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pamenkasanmadura. In *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (Vol. 53, Issue 9).

Muhammad S. Djarot S. Sensa, Sebuah Pemikiran Tentang Permukiman Islam, Mizan, Bandung, 1987, Hlm. 47

Muta'ali, Luthfi dan Arif Rahman Nugroho. Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal. *Gema Keadilan Edisi Jurnal* 17, 5(September), 16–31.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara RI Tahun 2021. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018 tentang

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Lembaran Negara RI Tahun 2018. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Lembaran Negara RI Tahun 2015. Jakarta

Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumon, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.31258/dli.4.2.p.117-127>

Rindarjono, Mohammad Gamal. *SLUM Urban Inequality: Reclamation, Inundation and Social Impact in Central Java, Indonesia*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2017.

SNI 03-1733-2004. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Permukiman di Perkotaan. Pokja PPAS Tahun 2019.

SNI 03-03-6981-2004. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan. Dokumen Indonesia 2015.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Wihadanto, A., Barus, B., Achsani, N. A., & Bratakusumah, D. S. (2017). Analisis Karakteristik dan Penilaian Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman 'Kampung Braga'-Kota Bandung Analysis on Characteristics and Untidiness level of Kampung Braga-Bandung City. *Journal of Regional and Rural Development Planning* Juni, 2017(2), 132–144.

Yani, S. A. (2020). Prioritas Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Lembah Damai Kota Pekanbaru dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Zulkarnaini, W. R., Elfindri, & Sari, D. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi. *Jurnal Planologi*, 16(2), 169.